



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 17 JUNI 2019
Waktu	: Pukul 14.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2020 dan RKP Tahun 2020 (RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2020)
Ketua Rapat	: Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M. Sc
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 25 dari 49 Anggota Panja Komisi VIII DPR RI 2. Kepala BNPB Beserta Jajaran

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2020 dan RKP Tahun 2020 (RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2020) pada pukul 14.14 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc dengan didampingi oleh Wakil Ketua TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si, dan dan H. Iskan Qolba Lubis, M.A. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan agenda membahas “**Pembicaraan Pendahuluan RKP-K/L BNPB Tahun 2020**” disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI prihatin atas Pagu Indikatif Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020 sebesar Rp450.646.814.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya sebesar Rp213.608.214.000,- (Dua Ratus Tiga Belas Milyar Enam Ratus Delapan Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).
 - b. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB sebesar Rp8.924.900.000,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
 - c. Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp228.113.700.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami dan mendukung usulan tambahan Anggaran BNPB tahun 2020 sebesar Rp689.761.774.000,-(Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) yang akan digunakan untuk:
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya sebesar Rp55.879.210.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
 - b. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB sebesar Rp11.213.170.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
 - c. Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp622.669.394.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)
3. Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut bersama Pejabat Eselon I Badan Nasional Penanggulangan Bencana atas pagu indikatif BNPB Tahun 2020 dan usulan tambahan anggaran BNPB Tahun 2020.

4. Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar dalam penyusunan RKA K/L Tahun 2020, dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
- a. Melakukan kajian dalam upaya penguatan kelembagaan BNPB untuk menjadi Kementerian
 - b. Mendesak BNPB untuk merespon upaya percepatan revisi Undang Undang No 24 Tahun 2007 yang diinisiasi DPR.
 - c. Mendorong paradigma dan konsep baru BNPB dengan titik berat pada mitigasi bencana dengan dukungan anggaran yang maksimal.
 - d. Terkait mitigasi bencana komisi VIII DPR RI mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana kepada pemerintah daerah dan masyarakat termasuk sekolah dan perguruan tinggi sesuai dengan jenis ancaman dan strategi bencana di wilayahnya
 - e. Mendesak BNPB melakukan terobosan dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan terkait minimnya anggaran dan efektifitas dalam penanggulangan bencana.
 - f. Mendesak pemanfaatan hasil riset dan kajian BNPB untuk digunakan dalam penetapan kebijakan pembangunan di Indonesia.
 - g. Mendorong BNPB untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian / Lembaga terkait serta melibatkan perusahaan asuransi dalam penanggulangan bencana.
 - h. Mendorong Pemerintah untuk membuat regulasi terkait penetapan alokasi anggaran minimal 1% dari APBD untuk pencegahan bencana

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 17.50 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI

KETUA,



DR. IR. H. SODIK MUDJAHID, M. SC